

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno. (1984). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ali, Mahrus. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Ashofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Cetakan ke-1, Yogyakarta: UII Press.
- Bertens, K. (2011). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buchari Said dan Averroes. (2013). *Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Campbell, Henry. (1999). *Black Law Dictionary 7th Edition dalam Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi Komisi Yudisial RI*, London: West Publishing CO,
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chaerudin. (2008). *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Darwan Prin. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Depdiknas. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke empat. Jakarta: Gramedia.

- Djoko Prakoso dan Nurwachid. (1983). *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, H., 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.
- Hornby, AS., (1968). *The Advance Learner's Dictionary of Current English dalam Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi Komisi Yudisial RI*. London: Oxford University Press.
- Kaligis, O.C., (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI. Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Lamintang, P.A.F., (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Litbang Mahkamah Agung. (2010). *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Lopa, Baharuddin. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mahkamah Agung RI. (2006). *Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Manson, Allan. (2001). *The Law of Sentencing*, New York: Irwin Law.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 2., (1992)*. Semarang: Alumni,

- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Cet. Ke-5. Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. (2013). *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Muchsin. (2004). *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Mulyadi, Lilik (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Mochtar Lubis dan James Scott. (1985). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2005). *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Paulus Hadi Suprpto, et. al., (2009). *Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Rukmini, Mien. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet 1. Jakarta : Sinar Grafika.

- Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Suparman, Eman. (2012). *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska,
- Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman. (1996). *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Simons. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*. Bandung: Pioner jaya.
- Soedjono. (1995). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, Heri. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang.
- Tresna, R., (1990). *Azas-Azas Hukum Pidana cet ke-3*. Jakarta: PT. Tiara.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

SEMA Nomor 07 Tahun 2012

SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.

C. Jurnal/Makalah/Artikel/Internet

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Semarang: Undip, 2002.

Agustina Wati Nainggolan, (2012), "*Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, dalam harian Suara Pembaruan, Jakarta, Kamis 20 April 2006.

Bambang Tri Bawono, *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari, 2004.

Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2013.

Harkristuti Harkrisnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan-Tahunan*, <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

Margaretha Yesicha Priscyllia dan Aloysius Wisnubroto, *Jurnal Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014.

Marwan Mas, *Local Workshop* 7 November 2013, dikutip dan Tama S. Langkun, (et.al), *Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.

Sukarno Aburaera, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Perdata*, Disertasi, PPs Universitas Hassnuddin, Makassar, 2004.

Syamsa Ardisasmita, “*Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*”, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 23 Agustus 2006, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006.

Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013.